

# PEDOMAN MUSRENBANGNAS 2018





## **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

### **Kata Pengantar**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur tahapan proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Salah satu tahapan terpenting yang menjadi bagian dalam proses tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Pasal 20 Ayat (1) UU SPPN mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Rancangan awal RKP tersebut memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan, indikasi program Kementerian/Lembaga (K/L), program lintas K/L dan program lintas wilayah, serta kaidah pelaksanaan.

Selanjutnya, K/L menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP 2019. Dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKP 2019 tersebut, dilakukan rangkaian Musrenbangnas Tahun 2018 untuk mewujudkan sinergi antara RKP dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan mendorong pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2018, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan Buku Panduan Rangkaian Musrenbangnas Tahun 2018 yang memuat mekanisme pelaksanaan dan informasi umum pelaksanaan rangkaian Musrenbangnas tersebut.

Selamat mengikuti rangkaian Penyusunan RKP 2019 dan Musrenbangnas 2018.

Jakarta, April 2018

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Gellwynn Jusuf

# Daftar Istilah

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BM	: <i>Bilateral Meeting</i> antara K/L dan mitra kerja K/L
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Kab.	: Kabupaten
K/L	: Kementerian/Lembaga
KP	: Kegiatan Prioritas
Musrenbangnas	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
Musrenbangprov	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi
MM	: <i>Multilateral Meeting</i> antar K/L dan mitra kerja K/L di Bappenas dalam satu Prioritas Nasional
PN	: Prioritas Nasional
PP	: Program Prioritas
PPD	: Penghargaan Pembangunan Daerah
Pro K/L	: Proyek K/L
Pro-P	: Proyek Prioritas
Rakorbangpus	: Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Rakortek	: Rapat Koordinasi Teknis
Renja K/L	: Rencana Kerja K/L
RKA K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran K/L
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SPPD	: Surat Perintah Perjalanan Dinas
TM	: <i>Trilateral Meeting</i> antara Bappenas, mitra kerja K/L dan Kementerian Keuangan

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>I</b>
<b>Daftar Istilah .....</b>	<b>II</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>III</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>V</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>VI</b>
<b>1. Umum .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Masukan .....	2
1.4 Keluaran .....	2
1.5 Mekanisme Penyelenggaraan .....	2
<b>2. Pembukaan Musrenbangnas .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tujuan .....	6
2.2 Agenda .....	6
2.3 Peserta .....	6
2.4 Mekanisme Penyelenggaraan .....	6
2.5 Tindak Lanjut .....	8
2.6 Teknis Penyelenggaraan .....	8
<b>3. Musrenbangnas .....</b>	<b>9</b>
3.1 Tujuan .....	9
3.2 Masukan .....	9
3.3 Peserta .....	9
3.4 Mekanisme Penyelenggaraan .....	9
3.5 Keluaran .....	22
3.6 Tindak Lanjut .....	22
3.7 Teknis Penyelenggaraan .....	22
LAMPIRAN .....	23
<b>Informasi Umum .....</b>	<b>24</b>
Kepanitiaan .....	24
Tempat Penyelenggaraan .....	27

Konfirmasi, Materi, dan Registrasi Peserta.....	27
Pakaian.....	27
Pengesahan SPPD.....	27
Sekretariat Panitia Musrenbangnas Tahun 2018.....	28
Akomodasi dan Transportasi .....	28
Konsumsi .....	28
Sakit dan Pertolongan P3K.....	28
Rumah Sakit .....	29
Masjid/Musholla .....	29
Toko Obat.....	29
Taksi .....	29
Situs Musrenbangnas.....	29

## Daftar Tabel

Tabel 1 Rangkaian Kegiatan dalam Rangka Penyusunan RKP 2019 .....	3
Tabel 2 Jadwal Acara Pembukaan Musrenbangnas 2018 .....	7
Tabel 3 Jadwal Pembahasan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat .....	8
Tabel 4 Pembagian Peran untuk Tahap Pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2018 .....	10
Tabel 5 Kelompok Pembahasan PN .....	13
Tabel 6 Pembagian Provinsi untuk Forum <i>Multilateral</i> Musrenbangnas 2018 .....	14
Tabel 7 Acara Hari I Rabu, 2 Mei 2018.....	15
Tabel 8 Acara Hari II Kamis, 3 Mei 2018 .....	16
Tabel 9 Acara Hari III Jumat, 4 Mei 2018 .....	17
Tabel 10 Acara Hari IV Senin, 7 Mei 2018 .....	18
Tabel 11 Acara Hari V Selasa, 8 Mei 2018 .....	19
Tabel 12 Acara Hari VI Rabu, 9 Mei 2018 .....	20
Tabel 13 Acara Hari VII Jumat, 11 Mei 2018 .....	21
Tabel 14 Panitia Rangkaian Musrenbangnas 2018 .....	24
Tabel 15 Peserta dalam Pembahasan PN 1.....	30
Tabel 16 Peserta dalam Pembahasan PN 2.....	33
Tabel 17 Peserta dalam Pembahasan PN 3.....	36
Tabel 18 Peserta dalam Pembahasan PN 4.....	39
Tabel 19 Peserta dalam Pembahasan PN 5.....	42

## Daftar Gambar

Gambar 1 Lampiran Berita Acara Kesepakatan (BAK) Musrenbangnas 2018.....	45
Gambar 2 Layout Ruang Pembahasan dan Teknis Pelaksanaan Musrenbangnas 2018 .....	46
Gambar 3 Denah Acara Pembukaan Musrenbangnas 2018 .....	47
Gambar 4 Denah Ruang Pembahasan PN 1 dan PN 2 (PP 4).....	48
Gambar 5 Denah Ruang Pembahasan PN 2 (PP 1,3)* dan Ruang Kesehatan .....	49
Gambar 6 Denah Ruang Pembahasan PN 3, PN 4 dan Ruang Sekretariat .....	50
Gambar 7 Denah Ruang Pembahasan PN 5 dan PN 2 (PP 5).....	51
Gambar 8 Denah Ruang Pembahasan Ruang Registrasi dan SPPD .....	52

# 1. Umum

## 1.1 Latar Belakang

Upaya penyempurnaan rencana pembangunan terus dilakukan. Pada penyusunan RKP 2019 pendekatan pembangunan dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

1. Tematik dalam penentuan tema-tema prioritas;
2. Holistik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah;
3. Integratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional; dan
4. Spasial dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas nasional.

Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam rangkaian Penyusunan RKP 2019 melalui berbagai tahapan penting, antara lain: Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP, Rakortek Pusat dan Daerah, Rangkaian Musrenbangprov, Rakorbangpus, MM, BM, TM dan Musrenbangnas. Pembahasan di dalam Musrenbangnas mengikuti empat prinsip di atas dan melibatkan berbagai K/L serta pemerintah provinsi dalam pembahasan 5 PN.

## 1.2 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Rangkaian Musrenbangnas Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2019 adalah:

1. Melakukan penyempurnaan rancangan akhir RKP 2019;
2. Melakukan penyerasian dan penyempurnaan rancangan Renja K/L 2019;
3. Melakukan penyerasian program, kegiatan, indikator serta lokasi kegiatan yang disusun oleh K/L dan pemerintah provinsi sesuai sasaran 5 PN, 9 pembangunan bidang, dan kaidah pelaksanaan;
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan melalui pembahasan detail kaidah pelaksanaan RKP 2019 yaitu kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka evaluasi; dan
5. Menyediakan arahan bagi penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2019.



### 1.3 Masukan

Masukan bagi Penyusunan RKP Tahun 2019 terutama adalah:

1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
2. Perpres No. 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
3. Renstra K/L 2015 - 2019 yang disusun oleh masing-masing K/L;
4. Rancangan Renja K/L Tahun 2019 yang disusun dengan rinci sampai tingkat provinsi (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) dengan memperhatikan hasil Rakortek, Rakorbangpus, MM, BM, TM, Musrenbangnas dan Rancangan RKP 2019;
5. Usulan program, kegiatan strategis daerah melalui aplikasi *e-planning* ([e-planning.bappenas.go.id](http://e-planning.bappenas.go.id)) dan *e-musrenbang* ([e-musrenbang.bappenas.go.id/](http://e-musrenbang.bappenas.go.id/));
6. SB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Rancangan Pagu Indikatif Tahun 2019; dan
7. Rancangan RKP 2019 yang telah disiapkan oleh Bappenas dengan memperhatikan hasil Rakortek, Musrenbangprov, Rakorbangpus, MM, BM, TM, Musrenbangnas serta RKA K/L tahun 2018.

### 1.4 Keluaran

Keluaran yang akan dihasilkan adalah:

1. Masukan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKP 2019;
2. Masukan bahan penyempurnaan Renja K/L 2019; dan
3. Masukan bahan penyempurnaan RKPD 2019.

### 1.5 Mekanisme Penyelenggaraan

Penyusunan RKP 2019 meliputi 18 tahapan utama yang secara ringkas digambarkan mulai dari tahapan awal pelaksanaan hingga tahapan akhir yang tertuang pada Tabel 1.

Dalam buku panduan ini, akan didetailkan dua agenda penting pada Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal dan Akhir RKP 2019, yaitu Pembukaan Musrenbangnas 2018 dan forum *multilateral* (persidangan) Musrenbangnas 2018.

**Tabel 1**  
**Rangkaian Kegiatan dalam Rangka Penyusunan RKP 2019**

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	4 Januari 2018	1. Penyelesaian/penetapan Tema dan Arah Kebijakan RKP 2019; 2. Penetapan Prioritas Nasional; 3. Temu Konsultasi Publik RPermen Penyusunan RKP.	Perancangan awal Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Nasional RKP 2019.
2.	8 Januari 2018	Rapat Pimpinan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi PN 2017 oleh Deputi PEPP/Wakil Koordinator;</li> <li>▪ Penentuan Sasaran RKP 2019, Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, dan Sasaran Prioritas Nasional;</li> <li>▪ Penentuan Sistematika Penulisan Narasi RKP 2019.</li> </ul>	Langkah awal penyusunan RKP 2019 melalui konsolidasi internal di Bappenas di tataran pimpinan sampai dengan Eselon II, untuk menentukan usulan Tema, PN dan PP dalam RKP 2019.
3.	12 Januari 2018	Rapat kerja internal penyusunan rancangan prioritas pembangunan	Penyampaian dan pembahasan rancangan sasaran PN, PP, KP dan Pro-PN untuk setiap PN.
4.	24 Januari 2018	Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas-Bappeda	Penyampaian Tema, Arah, kebijakan, dan Prioritas Nasional dalam RKP 2019, KEM, dan target pembangunan wilayah/provinsi.
5.	15 Februari 2018	Temu Konsultasi Triwulan II Bappenas dan Bappeda	Konfirmasi daerah atas target pembangunan wilayah/provinsi, serta pembaruan informasi terkait KEM.
6.	27 Februari – 1 Maret 2018	Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah Wilayah Barat	Konfirmasi, verifikasi, dan kesepakatan untuk sasaran pokok PN di daerah, Pro-K/L pendukung PN, Proyek Daerah pendukung PN, dan usulan
7.	6 – 8 Maret 2018	Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah Wilayah Timur	

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
			Proyek Prioritas Daerah.
8.	6 Maret – 27 April 2018	Rangkaian Musrenbangprov	Penyepakatan usulan kegiatan oleh pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dan bidang pembangunan sebagai bahan pembahasan Musrenbangnas, Sinkronisasi kegiatan K/L dan Pemerintah Daerah dalam PN.
9.	9 April 2018	Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP 2019 dan Pagu Indikatif	Pembahasan Rancangan Awal RKP 2019 dan Pagu Indikatif bersama DPR.
10.	18 April 2018	Rakorbangpus	Penyampaian rancangan awal RKP 2018 dan Rancangan Pagu Indikatif K/L Tahun 2018.
11.	19 – 27 April 2018	<i>Multilateral Meeting</i>	Pembahasan dan Penyepakatan Pro-PN dan Pro-K/L pendukung PN, khususnya terkait dengan sasaran, alokasi pagu dan lokasi per Pro-K/L yang telah disesuaikan dengan Rancangan Pagu Indikatif K/L Tahun 2019.
12.	19 – 27 April 2018	<i>Bilateral Meeting</i>	Penajaman kembali Proyek Pro-PN dan Pro-K/L pendukung PN, khususnya terkait dengan sasaran, alokasi pagu dan lokasi per Pro-K/L yang telah disesuaikan dengan Rancangan Pagu Indikatif K/L Tahun 2019 yang telah disepakati pada MM sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja K/L.
13.	30 April 2018	Pembukaan Musrenbangnas	Pembukaan rangkaian kegiatan sekaligus pemberian arahan dari Presiden RI untuk pelaksanaan Musrenbangnas tahun 2018.

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
14.	2 Mei – 11 Mei 2018	Musrenbangnas	Penyepakatan program, kegiatan, lokasi, target dan anggaran antara Bappenas, K/L dan Pemerintah Provinsi dalam bentuk forum multilateral dan disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan.
15.	Mei 2018	<i>Trilateral Meeting</i>	Penyesuaian dan penyelarasan antara Rancangan Renja K/L dengan Rancangan Awal RKP.
16.	Mei – Juni 2018	Sidang Kabinet Penetapan RKP 2019	Penyampaian Rancangan Akhir RKP 2019 kepada Presiden dan Kabinet Kerja.
17.	Mei – Juni 2018	Penyampaian RKP 2019 kepada DPR RI	Pembahasan RKP 2019 dengan DPR RI.
18.	Juni 2018	Penetapan Perpres RKP 2019	Penetapan RKP 2019 menjadi Peraturan Presiden.

## 2. Pembukaan Musrenbangnas

### 2.1 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas 2018 yaitu penyampaian arahan Bapak Presiden terkait dengan Rancangan Awal RKP Tahun 2019 yang disampaikan kepada K/L dan Pemerintah Daerah.

### 2.2 Agenda

Agenda pokok Pembukaan Musrenbangnas 2018 antara lain:

1. Laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait pelaksanaan Musrenbangnas 2018;
2. Pemutaran video mengenai sistem perencanaan dan penganggaran (*e-planning*) dan video mengenai PPD;
3. Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018 oleh Presiden RI;
4. Arahan Presiden RI sekaligus pembukaan secara resmi Musrenbangnas 2018; dan
5. Diskusi dan cerita inspiratif pelaku pembangunan.

### 2.3 Peserta

Peserta Pembukaan Musrenbangnas adalah Presiden, Wakil Presiden, para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota penerima PPD, Sekjen/Sesmen/Sestama, Sekretaris Daerah di lingkup Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, para Pejabat Eselon I/ II/ Fungsional Perencana Utama di lingkup Bappenas, Tim Penilai Independen PPD dan Media.

### 2.4 Mekanisme Penyelenggaraan

Acara Pembukaan Musrenbangnas 2018 akan diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel pada tanggal 30 April 2018. Pembukaan Musrenbangnas akan didahului oleh laporan pelaksanaan Musrenbangnas 2018 yang akan disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan dilanjutkan dengan pembukaan Musrenbangnas secara resmi oleh Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo. Dalam kegiatan ini disampaikan pula penerima PPD untuk kategori perencanaan dan pencapaian terbaik untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Diskusi dan cerita inspiratif dari pelaku pembangunan menjadi penutup agenda pokok Pembukaan Musrenbangnas 2018.

**Tabel 2**  
**Jadwal Acara Pembukaan Musrenbangnas 2018**

<b>Waktu (WIB)</b>	<b>Acara Utama</b>	<b>Pelaksana/Pembicara</b>
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 09.00 30'	Persiapan Kedatangan Presiden Republik Indonesia/Hiburan: Lagu-lagu daerah oleh Paduan Suara Bappenas	Panitia
<b>Pembukaan dan Arahan Presiden</b>		
09.00 – 11.00	Pembukaan dan Arahan Presiden Republik Indonesia	
5'	Presiden tiba di lokasi acara	
3'	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Paduan Suara Bappenas
5'	Pemutaran video singkat mengenai sistem perencanaan dan penganggaran ( <i>e-planning</i> )	Panitia
7'	Laporan Pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2018	Menteri PPN/Kepala Bappenas
5'	Pemutaran video singkat mengenai PPD	Panitia
15'	Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 oleh Presiden RI	Presiden RI
30'	Pengarahan Presiden RI sekaligus membuka secara resmi Musrenbangnas Tahun 2018	Presiden RI
40'	Diskusi dan cerita inspiratif dari pelaku pembangunan	MC oleh Cokky Sitohang
5'	Pembacaan Doa	Panitia
5'	Presiden keluar ruangan	
	Acara Selesai	

Pembahasan PN 2 PP 2 terkait program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan pasca pembukaan Musrenbangnas di tempat yang sama.

**Tabel 3**  
**Jadwal Pembahasan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat**

<b>Waktu</b>	<b>Pembahasan PN 2 PP 4</b>	<b>Ruang</b>
14.00 – 19.00	Papua	Puri Agung Ballroom
14.00 – 19.00	Papua Barat	Terrace Puri Agung

## 2.5 Tindak Lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas 2018 yaitu pelaksanaan Musrenbangnas 2018.

## 2.6 Teknis Penyelenggaraan

**Waktu dan Tempat.** Kegiatan Pembukaan Musrenbangnas diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 di Puri Agung Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel. Pembahasan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat diselenggarakan pada hari dan tempat yang sama setelah Pembukaan Musrenbangnas.

**Pembiayaan.** APBN melalui RKA-KL Bappenas untuk penyelenggaraan acara serta APBD untuk pembiayaan peserta dari provinsi ke lokasi kegiatan.

**Pelaksana Kegiatan.** Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

## 3. Musrenbangnas

### 3.1 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Musrenbangnas 2018 yaitu menyepakati usulan kegiatan antara Bappenas, K/L dan pemerintah provinsi per Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Pro-P), Proyek K/L (Pro-K/L) yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-P sebagai bahan penyusunan RKP 2019.

### 3.2 Masukan

Masukan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Musrenbangnas 2018 adalah Proyek K/L dan usulan daerah yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan MM dan BM.

### 3.3 Peserta

Peserta Musrenbangnas 2018 adalah Kedeputan Penanggung Jawab PN; Direktorat Sektor di Bappenas yang terkait dengan PN, Kepala Biro Perencanaan K/L dan Kepala Bappeda Provinsi.

### 3.4 Mekanisme Penyelenggaraan

Kegiatan Musrenbangnas 2018 merupakan kegiatan pembahasan dalam bentuk forum *multilateral*, yaitu antara penanggung jawab PN di Bappenas, K/L (c.q. Biro Perencanaan), dan Pemerintah Provinsi (c.q. Bappeda Provinsi) untuk menyepakati Pro-P, Pro-K/L yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-P.

Teknis pelaksanaan Musrenbangnas 2018 sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Kepala Persidangan;
2. *Login* dilakukan oleh Penanggung Jawab PN atau Kepala Persidangan yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab PN pada aplikasi Musrenbangnas dalam portal e-musrenbang (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/>);
3. Pembahasan dilakukan per PN dan per Provinsi, dengan lingkup Pro-P, Pro-K/L yang mendukung Pro-P, usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-P, serta DAK (penugasan dan afirmasi). Pembahasan difokuskan pada **usulan yang belum diputuskan** dalam Rakortek dan Diskusi Daring melalui Aplikasi. Waktu yang dialokasikan pada setiap sesi adalah 1 jam



30 menit dengan pembagian pembahasan usulan PN selama 1 jam, dan pembahasan DAK selama 30 menit;

4. Pembahasan dilaksanakan atas konfirmasi dan verifikasi hasil persandingan usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-P dengan dengan *list* indikator K/L yang terkait Pro-K/L pendukung Pro-P yang telah disepakati;
5. Hasil kesepakatan dalam forum Musrenbangnas dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (*print out* dari aplikasi e-musrenbang);
6. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dilakukan di dalam Forum Musrenbangnas oleh Kepala Persidangan, Perwakilan Provinsi, dan K/L; dan
7. Berita Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani (beserta lampiran berupa hasil notulensi *offline* jika ada) diserahkan kepada Panitia untuk digandakan dan dibagikan kepada perwakilan masing-masing.

**Tabel 4**  
**Pembagian Peran untuk Tahap Pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2018**

<b>Pelaksana</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Sekretariat Musrenbangnas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan bahan pembahasan;</li> <li>▪ Menerima Berita Acara Kesepakatan dari meja pembahasan yang sudah ditandatangani oleh perwakilan K/L, perwakilan provinsi dan pimpinan PN;</li> <li>▪ Merekapitulasi Berita Acara Kesepakatan yang disampaikan oleh Notulis;</li> <li>▪ Mendistribusikan hasil pembahasan kepada Penanggung Jawab PN, Provinsi, mitra K/L di Bappenas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi</li> <li>▪ Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan</li> <li>▪ Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan</li> </ul>
K/L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan analisis atas usulan provinsi hasil Rakortek dan diskusi daring;</li> <li>▪ Melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan kepada pemerintah provinsi;</li> <li>▪ Menandatangani Berita Acara Kesepakatan.</li> </ul>	Kepala Biro Perencanaan K/L
Pendamping Provinsi	Mengawal isu strategis dan usulan provinsi.	Pejabat Eselon II di Bappenas
Penghubung Provinsi ( <i>Liaison Officer/LO</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memantau dan mengumpulkan hasil pembahasan provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>▪ Mengikuti pembahasan bersama dengan provinsinya.</li> </ul>	Staf direktorat di Bappenas
Bappeda Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membahas seluruh usulan provinsi yang belum disepakati dalam rakortek dan</li> </ul>	Kepala Bappeda Provinsi

Pelaksana	Kegiatan	Penanggung Jawab
	diskusi daring; <ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani Berita Acara Kesepakatan.</li> </ul>	
Tim Layanan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan PC/laptop, printer, <i>infocus</i>, layar;</li> <li>Memastikan koneksi internet dan aplikasi berjalan dengan baik;</li> <li>Membantu bila ada permasalahan dengan aplikasi (berkoordinasi dengan penanggung jawab aplikasi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatin)</li> <li>Biro Umum</li> </ul>
Tim Perumus Hasil Musrenbangnas	Merumuskan hasil pembahasan.	Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi
Penanggung Jawab PN	Merumuskan hasil pembahasan PN yang menjadi tanggung jawabnya untuk diserahkan kepada Tim Perumus Hasil Musrenbangnas.	Penanggung Jawab PN
Kepala Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memimpin jalannya pembahasan;</li> <li>Mengawal waktu jalannya pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li> <li>Memfasilitasi pengambilan keputusan;</li> <li>Menandatangani Berita Acara Kesepakatan.</li> </ul>	Penanggung Jawab PP/KP
Notulis <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memandu tayangan materi pembahasan dari aplikasi;</li> <li>Menyusun Berita Acara Kesepakatan;</li> <li>Mencetak Berita Acara Kesepakatan;</li> <li>Menyerahkannya kepada Penanggung Jawab Ruang.</li> </ul>	Staf Penanggung Jawab PP/KP
Notulis <i>Offline</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencatat setiap hasil pembahasan;</li> <li>Mencetak notulensi dan menyerahkannya kepada Penanggung Jawab Ruang;</li> <li>Memastikan setiap pembahasan direkam (menggunakan <i>voice recorder</i>).</li> </ul>	Staf Penanggung Jawab PP/KP
Penanggung Jawab Ruang dan Pengatur Waktu ( <i>time keeper</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan K/L, Bappenas, dan Bappeda Provinsi hadir di setiap Ruang Pembahasan (berkoordinasi dengan PJ K/L, PJ Provinsi);</li> <li>Memastikan kelengkapan perlengkapan persidangan;</li> <li>Mencatat nama perwakilan Bappeda Provinsi yang akan menandatangani Berita Acara Kesepakatan untuk diserahkan kepada notulis online ;</li> <li>Memastikan pembahasan berjalan sesuai</li> </ul>	Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Pelaksana	Kegiatan	Penanggung Jawab
	jadwal; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menginformasikan sisa waktu pembahasan kepada pimpinan sidang;</li> <li>▪ Mengumpulkan Berita Acara Kesepakatan dan Catatan Pembahasan DAK dari Notulis;</li> <li>▪ Meminta tanda tangan Berita Acara Kesepakatan kepada Kepala Persidangan, Perwakilan Daerah, dan Perwakilan K/L;</li> <li>▪ Menyerahkan Berita Acara Kesepakatan dan Catatan Pembahasan yang telah ditandatangani kepada Penanggung Jawab Area pada setiap akhir sesi;</li> <li>▪ Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila terjadi permasalahan teknis;</li> <li>▪ Membantu penanganan permasalahan di setiap ruang pembahasan.</li> </ul>	
Penanggung Jawab Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan seluruh Penanggung Jawab Ruangan/Pengatur Waktu hadir dalam setiap ruang pembahasan;</li> <li>▪ Menerima Berita Acara Kesepakatan dan Catatan Pembahasan dari Penanggung Jawab Ruangan/Pengatur Waktu pada setiap akhir sesi.</li> </ul>	Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi
Penanggung Jawab K/L	Membantu Penanggung Jawab Ruangan menghubungi K/L dan internal Bappenas (terlibat dalam Ruang Pembahasan) yang belum hadir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitra Direktorat</li> <li>▪ Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi</li> </ul>
Penanggung Jawab Provinsi	Membantu Penanggung Jawab Ruangan menghubungi provinsi (terlibat dalam Ruang Pembahasan) yang belum hadir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi;</li> <li>▪ Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial</li> </ul>
Penanggung Jawab Aplikasi/Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan sistem aplikasi di setiap ruangan berjalan dengan optimal;</li> <li>▪ Menangani permasalahan sistem di setiap ruangan;</li> <li>▪ Mengupload bahan dan dokumen hasil kesepakatan (notulensi);</li> <li>▪ Mempersiapkan ID dan password K/L dan Daerah untuk mengunduh hasil pembahasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan</li> <li>▪ Pusdatin</li> </ul>

Forum Musrenbangnas akan dilakukan di Hotel Bidakara dengan jumlah ruang pembahasan sebanyak **16 ruang pembahasan (PN 2 PP 2 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat akan dilaksanakan pasca Pembukaan Musrenbangnas di Grand Sahid Jaya Hotel)**. Pembagian ruang pembahasan didasarkan pada banyaknya jumlah PN dengan memperhatikan jumlah PP terkait dalam masing-masing PN. Berikut adalah daftar PN dan PP serta pembagian ruang pembahasannya.

**Tabel 5**  
**Kelompok Pembahasan PN**

<b>No. PN</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Jumlah Ruang Pembahasan</b>	<b>Pembagian Pembahasan</b>	<b>Ruangan</b>
1.	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	4	1) PP 1 2) PP 2 3) PP 3 4) PP 4 dan 5	1A – Bima 1B – Bisma 1C – Nakula 1D – Kresna
2.	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	4	5) PP 1 6) PP 3 7) PP 4 8) PP 5	2A – Subadra-Drupadi 2B – Utari-Parikesit 2C – Sadewa 2D – Pandu 305
3.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	4	9) PP 1 10) PP 2 11) PP 3 12) PP 4 dan 5	3A – Kunthi 201 3B – Kunthi 206 3C – Kunthi 202 3D – Kunthi 203
4.	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	3	13) PP 1 14) PP 2 15) PP 3 dan 4	4A – Kunthi 207 4B – Kunthi 204 4C – Kunthi 205
5.	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	1	16) PP 1,2,3,4,5	5 – Pandu 306

**\*Catatan:** PN 2 PP 2 (Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) akan dibahas pasca Pembukaan Musrenbangnas

**Tabel 6**  
**Pembagian Provinsi untuk Forum *Multilateral* Musrenbangnas 2018**

No	Hari	Tanggal	Provinsi	
1.	Senin*	30 April	Papua	Papua Barat
2.	Rabu	2 Mei	Papua	Maluku
			Papua Barat	Maluku Utara
3.	Kamis	3 Mei	Aceh	Riau
			Sumatera Utara	Kepulauan Riau
			Sumatera Barat	
4.	Jumat	4 Mei	Jambi	Sumatera Selatan
			Bengkulu	Lampung
			Kep. Babel	
5.	Senin	7 Mei	Banten	Jawa Tengah
			DKI Jakarta	DIY
			Jawa Barat	
6.	Selasa	8 Mei	Kalimantan Barat	Kalimantan Selatan
			Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur
			Kalimantan Utara	
7.	Rabu	9 Mei	Sulawesi Utara	Sulawesi Barat
			Sulawesi Tenggara	Gorontalo
			Sulawesi Tengah	
8.	Jumat	11 Mei	Jawa Timur	NTB
			Sulawesi Selatan	NTT
			Bali	

**\*Catatan:** PN 2 PP 2 (Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) akan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.

**Tabel 7**  
**Acara Hari I Rabu, 2 Mei 2018**

Waktu Ruang	PN 1				PN 2				PN 3				PN 4			PN 5	
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	5	
08.30 – 10.00	Papua				Papua Barat				Maluku				Maluku Utara				
10.05 – 11.35					Papua				Papua Barat				Maluku			Maluku Utara	
11.35 – 13.00	ISTIRAHAT																
13.00 – 14.30	Maluku Utara								Papua				Papua Barat			Maluku	
14.35 – 16.05	Maluku				Maluku Utara								Papua			Papua Barat	
16.05 – 16.30	ISTIRAHAT																
16.30 – 18.00	Papua Barat				Maluku				Maluku Utara							Papua	

**Tabel 8**  
**Acara Hari II Kamis, 3 Mei 2018**

Waktu Ruang	PN 1				PN 2				PN 3				PN 4			PN 5	
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	5	
08.30 – 10.00	Aceh				Sumatera Utara				Sumatera Barat				Riau			Kepulauan Riau	
10.05 – 11.35	Kepulauan Riau				Aceh				Sumatera Utara				Sumatera Barat			Riau	
11.35 – 13.00	ISTIRAHAT																
13.00 – 14.30	Riau				Kepulauan Riau				Aceh				Sumatera Utara			Sumatera Barat	
14.35 – 16.05	Sumatera Barat				Riau				Kepulauan Riau				Aceh			Sumatera Utara	
16.05 – 16.30	ISTIRAHAT																
16.30 – 18.00	Sumatera Utara				Sumatera Barat				Riau				Kepulauan Riau			Aceh	

**Tabel 9**  
**Acara Hari III Jumat, 4 Mei 2018**

Waktu Ruang	PN 1				PN 2				PN 3				PN 4			PN 5
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	5
08.30 – 10.00	Jambi				Bengkulu				Kep. Babel				Sumatera Selatan			Lampung
10.05 – 11.35	Lampung				Jambi				Bengkulu				Kep. Babel			Sumatera Selatan
11.35 – 13.00	ISTIRAHAT															
13.00 – 14.30	Sumatera Selatan				Lampung				Jambi				Bengkulu			Kep. Babel
14.35 – 16.05	Kep. Babel				Sumatera Selatan				Lampung				Jambi			Bengkulu
16.05 – 16.30	ISTIRAHAT															
16.30 – 18.00	Bengkulu				Kep.Babel				Sumatera Selatan				Lampung			Jambi



**Tabel 10**  
**Acara Hari IV Senin, 7 Mei 2018**

Waktu Ruang	PN 1				PN 2				PN 3				PN 4			PN 5
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	5
08.30 – 10.00	Banten				DKI Jakarta				Jawa Barat				Jawa Tengah			DIY
10.05 – 11.35	DIY				Banten				DKI Jakarta				Jawa Barat			Jawa Tengah
11.35 – 13.00	ISTIRAHAT															
13.00 – 14.30	Jawa Tengah				DIY				Banten				DKI Jakarta			Jawa Barat
14.35 – 16.05	Jawa Barat				Jawa Tengah				DIY				Banten			DKI Jakarta
16.05 – 16.30	ISTIRAHAT															
16.30 – 18.00	DKI Jakarta				Jawa Barat				Jawa Tengah				DIY			Banten

**Tabel 11**  
**Acara Hari V Selasa, 8 Mei 2018**

Waktu Ruang	PN 1				PN 2				PN 3				PN 4			PN 5
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	5
08.30 – 10.00	Kalimantan Utara				Kalimantan Tengah				Kalimantan Timur				Kalimantan Barat			Kalimantan Selatan
10.05 – 11.35	Kalimantan Selatan				Kalimantan Utara				Kalimantan Tengah				Kalimantan Timur			Kalimantan Barat
11.35 – 13.00	ISTIRAHAT															
13.00 – 14.30	Kalimantan Barat				Kalimantan Selatan				Kalimantan Utara				Kalimantan Tengah			Kalimantan Timur
14.35 – 16.05	Kalimantan Timur				Kalimantan Barat				Kalimantan Selatan				Kalimantan Utara			Kalimantan Tengah
16.05 – 16.30	ISTIRAHAT															
16.30 – 18.00	Kalimantan Tengah				Kalimantan Timur				Kalimantan Barat				Kalimantan Selatan			Kalimantan Utara

**Tabel 12**  
**Acara Hari VI Rabu, 9 Mei 2018**

Waktu Ruang	PN 1				PN 2				PN 3				PN 4			PN 5
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	5
08.30 – 10.00	Sulawesi Utara				Sulawesi Tenggara				Sulawesi Tengah				Sulawesi Barat			Gorontalo
10.05 – 11.35	Gorontalo				Sulawesi Utara				Sulawesi Tenggara				Sulawesi Tengah			Sulawesi Barat
11.35 – 13.00	ISTIRAHAT															
13.00 – 14.30	Sulawesi Barat				Gorontalo				Sulawesi Utara				Sulawesi Tenggara			Sulawesi Tengah
14.35 – 16.05	Sulawesi Tengah				Sulawesi Barat				Gorontalo				Sulawesi Utara			Sulawesi Tenggara
16.05 – 16.30	ISTIRAHAT															
16.30 – 18.00	Sulawesi Tenggara				Sulawesi Tengah				Sulawesi Barat				Gorontalo			Sulawesi Utara

**Tabel 13**  
**Acara Hari VII Jumat, 11 Mei 2018**

Waktu Ruang	PN 1				PN 2				PN 3				PN 4			PN 5
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	5
08.30 – 10.00	Jawa Timur				Sulawesi Selatan				Bali				NTB			NTT
10.05 – 11.35	NTT				Jawa Timur				Sulawesi Selatan				Bali			NTB
11.35 – 13.00	ISTIRAHAT															
13.00 – 14.30	NTB				NTT				Jawa Timur				Sulawesi Selatan			Bali
14.35 – 16.05	Bali				NTB				NTT				Jawa Timur			Sulawesi Selatan
16.05 – 16.30	ISTIRAHAT															
16.30 – 18.00	Sulawesi Selatan				Bali				NTB				NTT			Jawa Timur

### 3.5 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dalam Musrenbangnas 2018 adalah kesepakatan pada Forum Musrenbangnas antara Pemerintah Pusat (K/L) dan daerah (diwakili Provinsi) sebagai masukan Rancangan Akhir RKP 2019.

### 3.6 Tindak Lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan Musrenbangnas 2018 yaitu penyusunan rancangan Akhir RKP 2019.

### 3.7 Teknis Penyelenggaraan

**Waktu dan Tempat.** Kegiatan Musrenbangnas diselenggarakan selama 7 (tujuh) hari kerja mulai dari hari Rabu, 2 Mei 2018 sampai dengan hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 di Hotel Bidakara.

**Pembiayaan.** APBN melalui RKA-KL Bappenas dan APBD provinsi untuk perjalanan dari provinsi ke lokasi pembahasan.

**Pelaksana Kegiatan.** Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

# LAMPIRAN

# Informasi Umum

## Kepanitiaan

Berbagai informasi mengenai materi dan tata laksana penyelenggaraan Rangkaian Musrenbangnas Tahun 2018, dapat menghubungi nama-nama yang tercantum dalam Tabel 14.

**Tabel 14**  
**Panitia Rangkaian Musrenbangnas 2018**

No.	Nama	Unit Kerja	Email
<b>Sekretariat Musrenbangnas</b>			
Peran: 1) Menyiapkan bahan pembahasan; 2) Menerima Berita Acara Kesepakatan dari meja pembahasan yang sudah ditandatangani oleh perwakilan K/L, perwakilan provinsi dan pimpinan PN; 3) Merekapitulasi Berita Acara Kesepakatan yang disampaikan oleh Notulis; 4) Mendistribusikan hasil pembahasan kepada Penanggung Jawab PN, Provinsi, mitra K/L di Bappenas, dan; 5) Memastikan keberhasilan rangkaian Musrenbangnas.			
1.	Riya Farwati	Dit. PUKMK	riya.farwati@bappenas.go.id
2.	Mahastuti	Dit. PUKMK	asti@bappenas.go.id
3.	Gayatri Waditra Nirwesti	Dit. PUKMK	gayatri.nirwesti@bappenas.go.id
4.	Mariska	Dit. PUKMK	mariska.suwardi@bappenas.go.id
5.	Dini Ajani Putri	Dit. PUKMK	dini.putri@bappenas.go.id
<b>Pembukaan Musrenbangnas</b>			
Peran: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas (lokasi & jadwal); 2) Mengoordinasikan kehadiran Presiden; 3) Menyiapkan administrasi acara (surat undangan); 4) Menyiapkan dialog Presiden dengan Gubernur, Masyarakat, dan Dunia Usaha, dan; 5) Memastikan keberhasilan pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas.			
6.	Budi Cahyono	Biro Humas	budi.cahyono@bappenas.go.id
7.	Harjono	Biro Humas	harjono@bappenas.go.id
8.	Ismet Muhammad Suhut	Biro Humas	ismet@bappenas.go.id

No.	Nama	Unit Kerja	Email
<b>Pembahasan Program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat</b>			
Peran: Menyiapkan sesi pembahasan Papua dan Papua Barat setelah Pembukaan Musrenbangnas.			
9.	Taufik Hanafi	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	taufik@bappenas.go.id
<b>Tim Materi</b>			
Peran: Menyiapkan materi pembahasan pada aplikasi e-musrenbang dan <i>handout</i> (jika ada).			
10.	Ika Retna Wulandary	Dit. PWK	ika.wulandary@bappenas.go.id
11.	Bimo Fahrizal Arvianto	Dit. PWK	bimo.arvianto@bappenas.go.id
12.	Moehammad Nawaludin DJS	Dit. Sisdur	moehamad.nawaludin@bappenas.go.id
<b>Tim Persidangan dan Pembahasan</b>			
Peran: 1) Menyiapkan materi dan kelengkapan lainnya dalam ruangan persidangan; 2) Memastikan seluruh peserta persidangan (Bappenas, K/L, dan Provinsi) hadir pada tempat dan jam yang sesuai dengan jadwal; 3) Memastikan ketepatan waktu persidangan, dan; 4) Memastikan kelancaran persidangan di ruangan maupun area persidangan.			
13.	Mardiah Thamrin	Dit. SPPEPP	torrymt@bappenas.go.id
14.	Heriyadi	Dit. SPPEPP	heriyadi@bappenas.go.id
15.	Indra Wisaksono	Dit. SPPEPP	indra.wisaksono@bappenas.go.id
16.	Prakosa Grahayudiandono	Dit. SPPEPP	prakosa.g@bappenas.go.id
<b>Tim e-musrenbang</b>			
Peran: 1) Menyiapkan sistem e-musrenbang, dan; 2) Memastikan sistem e-musrenbang berjalan dengan baik pada saat persidangan.			
17.	Yudianto	Dit. PWK	yudianto@bappenas.go.id
18.	Taufik Muhlis	Pusdatin	taufik.muhlis@bappenas.go.id



No.	Nama	Unit Kerja	Email
19.	Agus Riyadi	Dit. Sisdur	agus.riyadi@bappenas.go.id
20.	Setya Rusdianto	Dit. PWK	setya.rusdianto@support.bappenas.go.id
<b>Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)</b>			
Peran: 1) Menyampaikan hasil seleksi PPD; 2) Memastikan kehadiran penerima penghargaan, dan; 3) Memastikan penyerahan penghargaan berjalan dengan baik.			
21.	Bambang Triyono	Dit. PEPPD	btريوно@bappenas.go.id
22.	Ika Widyawati	Dit. PEPPD	ika.widyawati@bappenas.go.id
23.	Yudhie Hatmadji Sudjarwo	Dit. PEPPD	yudhie.sudjarwo@bappenas.go.id
<b>Tim Tata Laksana</b>			
Peran: 1) Menyiapkan kebutuhan teknis, dan; 2) Mendukung tata laksana pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas dan Persidangan Musrenbangnas.			
24.	Arif Rachmansyah	Biro Umum	arsyach230612@gmail.com
25.	Nurpi	Biro Umum	nurpi@bappenas.go.id
26.	Titin Gantini	Biro Umum	titin.gantini@bappenas.go.id
27.	Maharani	Biro Renortala	maharani@bappenas.go.id
28.	Dedeh Heni Herlina	Pusdatin	heni@bappenas.go.id
29.	Veni Marlina	Klinik	veny.marlina@support.bappenas.go.id
30.	Tuhu Wagiono	Biro Umum	tuhu.wagiono@bappenas.go.id
31.	Santari	Biro Umum	
32.	Hari Dwi Koriando	Pusdatin	haridk@bappenas.go.id
33.	Roni Komala W	Pusdatin	ronikw@bappenas.go.id
34.	Asep Sukmayadi	Pusdatin	asukmayadi@bappenas.go.id

## Tempat Penyelenggaraan

Tempat pelaksanaan **Pembukaan Musrenbangnas 2018** adalah:  
Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

Tempat pelaksanaan **persidangan Musrenbangnas 2018** adalah:  
Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870.

## Konfirmasi, Materi, dan Registrasi Peserta

Konfirmasi kehadiran Pembukaan Musrenbangnas dan persidangan Musrenbangnas dilakukan secara *online* sebelum pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas melalui website: <https://musrenbangnas.bappenas.go.id/registrasi>.

Tanda pengenal (termasuk untuk persidangan Papua dan Papua Barat) dapat diambil pada hari **Minggu, 29 April 2018** mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Candi Pawon 1-2, Grand Sahid Jaya Hotel.

Sementara tanda pengenal dan materi persidangan Musrenbangnas dapat diambil pada hari **Selasa, 1 Mei 2018** mulai pukul 13.00 WIB dan selama persidangan Musrenbangnas pada tanggal **2–11 Mei 2018 (kecuali hari libur nasional)** mulai pukul 7.30 WIB di ruang Arimbi 111, Hotel Bidakara.

Petugas Penghubung: Budi Cahyono, Nuryadi, Harjono (Biro Humas).

## Pakaian

Pakaian untuk kegiatan pembukaan Musrenbangnas, pria menggunakan batik lengan panjang, wanita berpakaian bebas rapi dan untuk TNI dan Polri menggunakan PDH (Pakaian Dinas Harian). Untuk pembahasan harian Musrenbang menggunakan PDH (Pakaian Dinas Harian) atau PSH (Pakaian Sipil Harian).

## Pengesahan SPPD

Panitia menyediakan meja khusus untuk pelayanan pemberian cap SPPD untuk peserta dari daerah. Khusus Pembukaan Musrenbangnas dan persidangan Papua dan Papua Barat, layanan SPPD dilakukan pada hari **Minggu, 29 April 2018** mulai pukul 13.00 WIB di seberang ruang Reformasi, Grand Sahid Jaya Hotel.

Sementara layanan SPPD untuk persidangan Musrenbangnas dilakukan selama persidangan, yaitu tanggal **2–11 Mei 2018 (kecuali hari libur nasional)** mulai pukul 8.00 WIB di teras ruang Arimbi 111, Hotel Bidakara.

Petugas Penghubung: Titin Gantini (Bagian Keuangan).

## **Sekretariat Panitia Musrenbangnas Tahun 2018**

Sekretariat kepanitiaan Musrenbangnas Tahun 2018 adalah Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, Jl. Taman Suropati No. 2-4, Jakarta-10310, Gedung Madiun, Lantai 6, Telp./Faksimile: (021) 3101861 ext. 3544 atau (021) 31934511, Email: pkukm@bappenas.go.id.

Untuk Pembukaan Musrenbangnas, ruang Sekretariat terletak di Ruang Reformasi, Grand Sahid Jaya Hotel. Sementara selama persidangan Musrenbangnas, ruang Sekretariat terletak di Ruang Kunthi 208, Hotel Bidakara.

## **Akomodasi dan Transportasi**

Seluruh biaya transportasi dari dan ke tempat pelaksanaan acara Musrenbangnas 2018 serta akomodasi/penginapan peserta ditanggung oleh masing-masing peserta. Peserta dapat menghubungi sendiri pihak hotel untuk reservasi, antara lain:

1. Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, telp: (021) 5704444;
2. Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 71-73, telp: (021) 83793555;
3. Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jl. Gatot Subroto, telp: (021) 8379 3555;
4. Hotel Puri Casablanca, Jl. Puri Casablanca No. 1, telp: (021) 30038888;
5. The Park Lane Jakarta, Jl. Casablanca, telp: (021) 8282000;
6. Harris Hotel, Jl. Dr. Saharjo No. 191, telp: (021) 8303355;
7. Hotel Aston Rasuna Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said, telp: (021) 83705555;
8. Hotel Gran Melia Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said, telp: (021) 5268080;
9. Arion Swiss Belhotel, Jl. Kemangraya No.7, telp: (021) 7198000;
10. Aston Priority Simatupang Hotel, Jl. T.B. Simatupang, telp: (021) 78838777;
11. Hotel Kartika Candra, Jl. Gatot Subroto, telp: (021) 525 0808;
12. Hotel Maharadja, Jl. Mampang Prapatan, telp: (021) 7918 004455.

## **Konsumsi**

Konsumsi yang disediakan oleh panitia adalah konsumsi selama persidangan Musrenbangnas, meliputi: makan siang dan *snack*.

Petugas Penghubung: Dedeh Heni Herlina (Pusdatin).

## **Sakit dan Pertolongan P3K**

Apabila kurang sehat/sakit, Bappenas menyediakan ruang kesehatan yang terletak di ruang *C&C office* di Grand Sahid Jaya Hotel, dan ruang Gatot Kaca di Hotel Bidakara. Selain itu Hotel Bidakara memiliki POLIKLINIK yang terletak di Bina Sentra *Building* Lantai Dasar. Petugas Penghubung: Veni (Klinik).

## Rumah Sakit

Rumah Sakit terdekat dari Hotel Bidakara antara lain:

1. Rumah Sakit MEDISTRA di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 Jakarta Selatan, telepon (021) 5210200;
2. Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) di Jl.H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta Selatan, telepon (021) 5203435;
3. Rumah Sakit Tria Dipa di Jl. Raya Pasar Minggu No. 3A, Pancoran, Jakarta Selatan telepon (021) 7974071, (021) 7974073.

## Masjid/Musholla

Tempat melaksanakan ibadah sholat, di *basement* Hotel Bidakara.

## Toko Obat

Terletak di lantai dasar, berseberangan dengan Ruang Baladewa, *Drugstore Mini* menyediakan obat-obatan ringan.

## Taksi

Taksi PUTRA tersedia di depan Hotel Bidakara. Untuk pemesanan taksi silakan menghubungi petugas *front office* yang akan membantu memesan taksi, atau hubungi taksi *Blue Bird Group* (terdiri atas taksi Morante, Cenderawasih, Pusaka Nuri, Lintas Buana, dan Pusaka Satria serta *Silver Bird* atau *Golden Bird*) pada nomor telepon (021) 7917 1234. Taksi online seperti Go-Car, Grab Car, dan Uber juga tersedia yang dapat dipesan melalui aplikasi *smartphone*.

## Situs Musrenbangnas

Informasi lebih rinci mengenai hasil pembahasan *ruang pembahasan* dapat diperoleh melalui website: <https://e-planning.bappenas.go.id>.

Sedangkan untuk informasi umum (selain hasil pembahasan *ruang pembahasan*) dapat diperoleh melalui website: <https://musrenbangnas.bappenas.go.id>.

**Tabel 15**  
**Peserta dalam Pembahasan PN 1**

<b>PN 1: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</b>	
Penanggung Jawab PN	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Penanggung Jawab Harian	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Penanggung Jawab PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial</li> <li>▪ Direktur Pendidikan dan Agama</li> <li>▪ Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat</li> <li>▪ Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman</li> <li>▪ Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial</li> </ul>
Jumlah Ruang Pembahasan	4 (empat)
Jumlah PP	5 (lima)
Jumlah KP	20 (dua puluh)
Rincian PP dan KP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran</li> <li>b. Penguatan Sistem Jaminan Sosial</li> <li>c. Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan</li> <li>d. Pelaksanaan Reforma Agraria</li> <li>e. Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial</li> </ol> </li> <li>2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>b. Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></li> <li>c. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</li> <li>e. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata</li> <li>b. Penyediaan Afirmasi Pendidikan</li> <li>c. Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan</li> <li>d. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik</li> </ul> </li> <li>4. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau</li> <li>b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak</li> <li>c. Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman</li> </ul> </li> <li>5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu</li> <li>b. Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>c. Percepatan Pencapaian SPM di Daerah</li> </ul> </li> </ul>	
Notulis	Online dan Offline ditunjuk oleh masing-masing penanggung jawab PP/KP sesuai dengan jadwal persidangan	
Lokasi Ruang Pembahasan	PP 1	Desk 1A - Bima
	PP 2	Desk 1B - Bisma
	PP 3	Desk 1C - Nakula
	PP 4 & 5	Desk 1D - Kresna

K/L		Direktorat Sektor	
1. Kementerian Sosial	16. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)	1. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	15. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Direktorat Pendidikan dan Agama	16. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3. Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	17. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN
4. Kementerian Agama	19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	4. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	18. Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	20. Kementerian Perindustrian	5. Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika	19. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
6. Kementerian Pertanian	21. Kementerian Pariwisata	6. Direktorat Pengairan dan Irigasi	20. Direktorat Hukum dan Regulasi
7. Kementerian Dalam Negeri	22. Kementerian Olahraga dan Pemuda	7. Direktorat Transportasi	21. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
8. Kementerian Kesehatan	23. Kementerian Perhubungan	8. Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman	22. Direktorat Lingkungan Hidup
9. Kementerian Ketenagakerjaan	24. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	9. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	23. Direktorat Aparatur Negara
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan	25. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi	10. Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	24. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika	26. Mahkamah Agung	11. Direktorat Kelautan dan Perikanan	25. Direktorat Pangan dan Pertanian
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27. Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	12. Direktorat Politik dan Komunikasi	26. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN		13. Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	27. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional
14. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		14. Direktorat Otonomi Daerah	28. Direktorat Pertahanan dan Keamanan
15. Badan Informasi Geospasial (BIG)			

**Tabel 16**  
**Peserta dalam Pembahasan PN 2**

<b>PN 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</b>	
Penanggung Jawab PN	Deputi Bidang Pengembangan Regional
Penanggung Jawab Harian	Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan
Penanggung Jawab PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Transportasi</li> <li>▪ Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika</li> <li>▪ Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan</li> <li>▪ Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan</li> <li>▪ Direktur Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
Jumlah Ruang Pembahasan	4 (empat)
Jumlah PP	5 (lima)
Jumlah KP	21 (dua puluh satu)
Rincian PP dan KP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Konektivitas dan TIK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut</li> <li>b. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimedia dan Perkotaan</li> <li>c. Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utara Transportasi</li> <li>d. Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi</li> <li>e. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK</li> </ol> </li> <li>2. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kontekstual Papua</li> <li>c. Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata Hulu Hilir</li> </ol> </li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, dan Konektivitas antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik, dan Kampung</li> <li>e. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan</li> <li>b. Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi</li> <li>c. Percepatan Pembangunan Desa</li> </ul> </li> <li>4. Penanggulangan Bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana</li> <li>b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan</li> <li>c. Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca bencana</li> <li>d. Penguatan Manajemen Kebencanaan</li> </ul> </li> <li>5. Peningkatan Sistem Logistik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian</li> <li>b. Penyediaan Sarana Angkut Produk Perikanan, Kelautan, dan Pertanian</li> <li>c. Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik</li> <li>d. Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Pendukung Sistem Logistik</li> </ul> </li> </ol>	
Notulis	Online dan Offline ditunjuk oleh masing-masing penanggung jawab PP/KP sesuai dengan jadwal persidangan	
Lokasi Ruang Pembahasan	PP 1	Desk 2A – Subadra-Drupadi
	PP 3	Desk 2B – Utari-Parikesit
	PP 4	Desk 2C – Sadewa
	PP 5	Desk 2D – Pandu 305

K/L		Direktorat Sektor
1. Kementerian Perhubungan	23. Kementerian Sosial	1. Direktorat Transportasi
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ BASARNAS	25. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Direktorat Pengairan dan Irigasi
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika	26. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	4. Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Rancang Bangun
5. Lembaga Penyiar Publik Radio Republik Indonesia	27. Kementerian Kesehatan	5. Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika
6. Lembaga Penyiar Publik Televisi Republik Indonesia	28. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	6. Direktorat Otonomi Daerah
7. Kementerian Dalam Negeri	29. Kementerian Luar Negeri	7. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan
8. Kementerian Ketenagakerjaan	30. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	8. Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan	31. Kementerian Agama	9. Direktorat Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Keuangan	32. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	10. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
11. Badan Pusat Statistik	33. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	11. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
12. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	34. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	12. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	35. Badan Tenaga Nuklir Nasional	13. Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi
14. Badan Informasi Geospasial	36. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	14. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	37. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	15. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	38. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	16. Direktorat Pangan dan Pertanian
17. Kementerian Pertanian	39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	17. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. Kementerian Pariwisata	40. Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	18. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
19. Kementerian Perindustrian	41. Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN	19. Direktorat Pertahanan dan Keamanan
20. Kementerian Perdagangan		20. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
21. Kementerian Pertahanan		21. Direktorat Politik dan Komunikasi
22. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		22. Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial
		23. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
		24. Direktorat Lingkungan Hidup
		25. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
		26. Direktorat Hukum dan Regulasi
		27. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
		28. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral
		29. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
		30. Direktorat Pendidikan dan Agama
		31. Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan
		32. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN

**Tabel 17**  
**Peserta dalam Pembahasan PN 3**

<b>PN 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya</b>	
Penanggung Jawab PN	Deputi Bidang Ekonomi
Penanggung Jawab Harian	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter
Penanggung Jawab PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Pangan dan Pertanian</li> <li>▪ Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>▪ Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional</li> <li>▪ Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</li> <li>▪ Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan</li> </ul>
Jumlah Ruang Pembahasan	4 (empat)
Jumlah PP	5 (lima)
Jumlah KP	22 (dua puluh dua)
Rincian PP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> </ol> </li> <li>2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi</li> <li>b. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan</li> <li>d. Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK/Logistik</li> </ul> <p>3. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata termasuk 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan</li> <li>b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif</li> <li>c. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)</li> <li>d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri</li> <li>e. Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</li> </ul> <p>4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha</li> <li>b. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</li> <li>c. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi</li> <li>d. Peningkatan Keterampilan Wirausaha</li> </ul> <p>5. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas</li> <li>b. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas</li> <li>c. Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti, Perekayasa)</li> <li>d. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier</li> </ul>	
Notulis	Online dan Offline ditunjuk oleh masing-masing penanggung jawab PP/KP sesuai dengan jadwal persidangan	
Lokasi Ruang Pembahasan	PP 1	Desk 3A – Kunthi 201
	PP 2	Desk 3B – Kunthi 206
	PP 3	Desk 3C – Kunthi 202
	PP 4 dan 5	Desk 3D – Kunthi 203

K/L		Direktorat Sektor
1. Badan Ekonomi Kreatif	19. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)	20. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. Direktorat Otonomi Daerah
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal	21. Kementerian Luar Negeri	3. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
4. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi	22. Kementerian Pariwisata	4. Direktorat Politik dan Komunikasi
5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5. Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)	24. Kementerian Pemuda dan Olahraga	6. Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan
7. Badan Pusat Statistik	25. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	7. Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi
8. BATAN	26. Kementerian Perdagangan	8. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	27. Kementerian Perhubungan	9. Direktorat Pengairan dan Irigasi
10. Kementerian Dalam Negeri	28. Kementerian Pertanian	10. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	29. Kementerian Perindustrian	11. Direktorat Transportasi
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan	30. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	12. Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman
13. Kementerian Kesehatan	31. Kementerian Sosial	13. Direktorat Pangan dan Pertanian
14. Kementerian Ketenagakerjaan	32. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)	14. Direktorat Kelautan dan Perikanan
15. Kementerian Keuangan	33. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	15. Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun
16. Kementerian Komunikasi dan Informatika	34. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	16. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
17. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	35. Mahkamah Agung	17. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	36. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	18. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
	37. Badan Siber dan Sandi Negara	19. Direktorat Lingkungan Hidup
	38. Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	20. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
	39. Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN	21. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN
		22. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan
		23. Direktorat Perencanaan makro dan Analisis Statistik
		24. Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		25. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
		26. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		27. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
		28. Direktorat Pangan dan Pertanian
		29. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

**Tabel 18**  
**Peserta dalam Pembahasan PN 4**

<b>PN 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</b>	
Penanggung Jawab PN	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Penanggung Jawab Harian	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Penanggung Jawab PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan</li> <li>▪ Direktur Pangan dan Pertanian</li> <li>▪ Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air</li> <li>▪ Direktur Lingkungan Hidup</li> <li>▪ Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air</li> </ul>
Jumlah Ruang pembahasan	3 (tiga)
Jumlah PP	4 (empat)
Jumlah KP	18 (delapan belas)
Rincian PP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya.</li> <li>b. Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik</li> <li>c. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</li> <li>d. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri</li> <li>e. Peningkatan Efisiensi Energi</li> </ol> </li> <li>2. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan</li> <li>b. Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan</li> <li>c. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan</li> <li>e. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan</li> </ul> <p>3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem</li> <li>b. Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif</li> <li>c. Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air</li> <li>d. Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul> <p>4. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>b. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>c. Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>d. Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> </ul>	
Notulis	Online dan Offline ditunjuk oleh masing-masing penanggung jawab PP/KP sesuai dengan jadwal persidangan	
Lokasi Ruang pembahasan Pembahasan	PP 1	Desk 4A – Kunthi 207
	PP 2	Desk 4B – Kunthi 204
	PP 3 dan 4	Desk 4C – Kunthi 205

K/L	Direktorat Sektor
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Informasi Geospasial</li> <li>2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</li> <li>3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN</li> <li>4. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>7. Kementerian Koperasi dan UKM</li> <li>8. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>9. Kementerian Perdagangan</li> <li>10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>11. Kementerian Pertanian</li> <li>12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</li> <li>13. Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri</li> <li>14. Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>2. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air</li> <li>3. Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun</li> <li>4. Direktorat Kelautan dan Perikanan</li> <li>5. Direktorat Lingkungan Hidup</li> <li>6. Direktorat Otonomi Daerah</li> <li>7. Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi</li> <li>8. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan</li> <li>9. Direktorat Pangan dan Pertanian</li> <li>10. Direktorat Pengairan dan Irigasi</li> <li>11. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial</li> <li>12. Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman</li> <li>13. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional</li> <li>14. Direktorat Politik dan Komunikasi</li> <li>15. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan</li> <li>16. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>17. Direktorat Transportasi</li> </ol>



**Tabel 19**  
**Peserta dalam Pembahasan PN 5**

<b>PN 5: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b>	
Penanggung Jawab PN	Deputi Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
Penanggung Jawab Harian	Direktur Pertahanan dan Keamanan
Penanggung Jawab PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Pertahanan dan Keamanan</li> <li>▪ Direktur Politik dan Komunikasi</li> <li>▪ Direktur Pertahanan dan Keamanan</li> <li>▪ Direktur Hukum dan Regulasi</li> <li>▪ Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional</li> </ul>
Jumlah Ruang pembahasan	1 (satu)
Jumlah PP	5 (lima)
Jumlah KP	20 (dua puluh)
Rincian PP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamtibnas dan Keamanan Siber               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</li> <li>b. Penanggulangan Konflik Sosial</li> <li>c. Penanganan Penyalahgunaan Narkoba</li> <li>d. Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber</li> <li>e. Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme</li> </ol> </li> <li>2. Kesuksesan Pemilihan Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Lembaga Demokrasi</li> <li>b. Peningkatan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil</li> <li>c. Pengamanan Pemilihan Umum</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019</li> <li>3. Pertahanan Wilayah Nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan</li> <li>b. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara</li> <li>c. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi</li> </ul> </li> <li>4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan Hukum</li> <li>b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> <li>c. Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi</li> <li>d. Manajemen Talenta Indonesia</li> </ul> </li> <li>5. Efektivitas Diplomasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri</li> <li>b. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik dan Keamanan</li> <li>c. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional</li> <li>d. Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika</li> </ul> </li> </ul>	
Notulis	Online dan Offline ditunjuk oleh masing-masing penanggung jawab PP/KP sesuai dengan jadwal persidangan	
Lokasi Ruang pembahasan Pembahasan	PP 1,2,3,4,5	Desk 5 – Pandu 306

K/L		Direktorat Sektor
1. Badan Pengawas Pemilu	11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	1. Direktorat Aparatur Negara
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	12. Kementerian Dalam Negeri	2. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
3. Badan Keamanan Laut	13. Kementerian Luar Negeri	3. Direktorat Hukum dan Regulasi
4. Badan Siber dan Sandi Negara	14. Kementerian Pertahanan	4. Direktorat Kelautan dan Perikanan
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	15. Kementerian Pemuda dan Olahraga	5. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
6. Badan Narkotika Nasional	16. Kementerian Sosial	6. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
7. Badan Informasi Geospasial	17. Kepolisian Republik Indonesia	7. Direktorat Otonomi Daerah
8. Badan Kepegawaian Negara	18. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	8. Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan
9. Badan Intelijen Negara	19. Komisi Yudisial Republik Indonesia	9. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
10. Kementerian Agama	20. Mahkamah Agung	10. Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial
	21. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	11. Direktorat Pertahanan dan Keamanan
	22. Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	12. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan
		13. Direktorat Politik dan Komunikasi
		14. Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		15. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

## Gambar 1

### Lampiran Berita Acara Kesepakatan (BAK) Musrenbangnas 2018



PN : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....

#### BERITA ACARA KESEPAKATAN

Provinsi : Provinsi .....

Koordinator : Kementerian PPN / Bappenas  
 Ruangan

Notulis :

Nama	Tanda Tangan
.....	
.....	
.....	

Pada hari ini, kami yang bertanda tangan telah membahas :

##### Rekapitulasi Kesepakatan Proyek KL Pendukung Prioritas Nasional

No	Keterangan	Target	Dana (Juta)
1	Disetujui dengan Anggaran K/L		
2	Belum Ada Kesepakatan		
3	Ditolak		

##### Rekapitulasi Kesepakatan Proyek Non/KL Pendukung Prioritas Nasional

No	Keterangan	Target	Dana (Juta)
1	Disetujui dengan Anggaran BUMN/Non KL		
2	Belum Ada Kesepakatan		
3	Ditolak		

##### Rekapitulasi Kesepakatan e-Proposal (DAK Penugasan) Pendukung Prioritas Nasional (Kewenangan Pusat)

No	Keterangan	Target	Dana (Juta)
1	Disetujui		
2	Dibahas lebih lanjut		
3	Belum Ada Kesepakatan		
4	Ditolak		

##### Detail hasil pembahasan :

1. Daerah dan Kementerian pada [https://e-musrenbang.bappenas.go.id/bappenas\\_sso\\_final/](https://e-musrenbang.bappenas.go.id/bappenas_sso_final/)
2. Bappenas pada <https://hasilrapat.bappenas.go.id/>

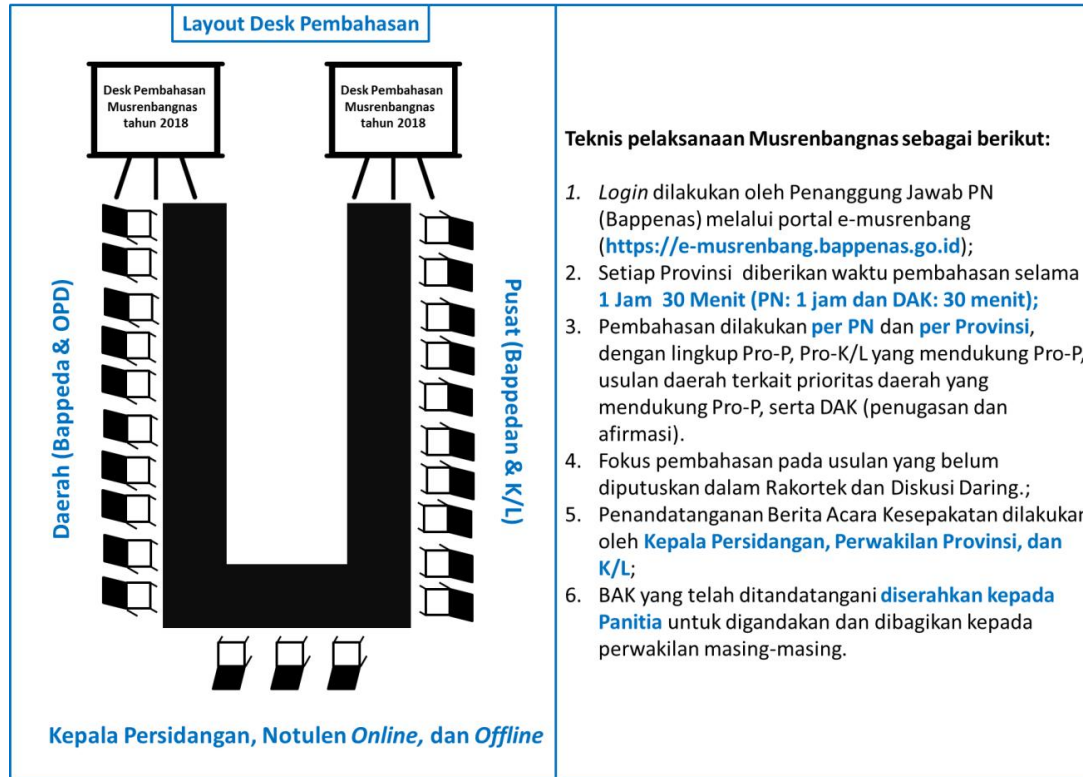
Kementerian	Nama	Tanda Tangan
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	

#### LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN :

PN : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....

##### KETERANGAN TAMBAHAN :

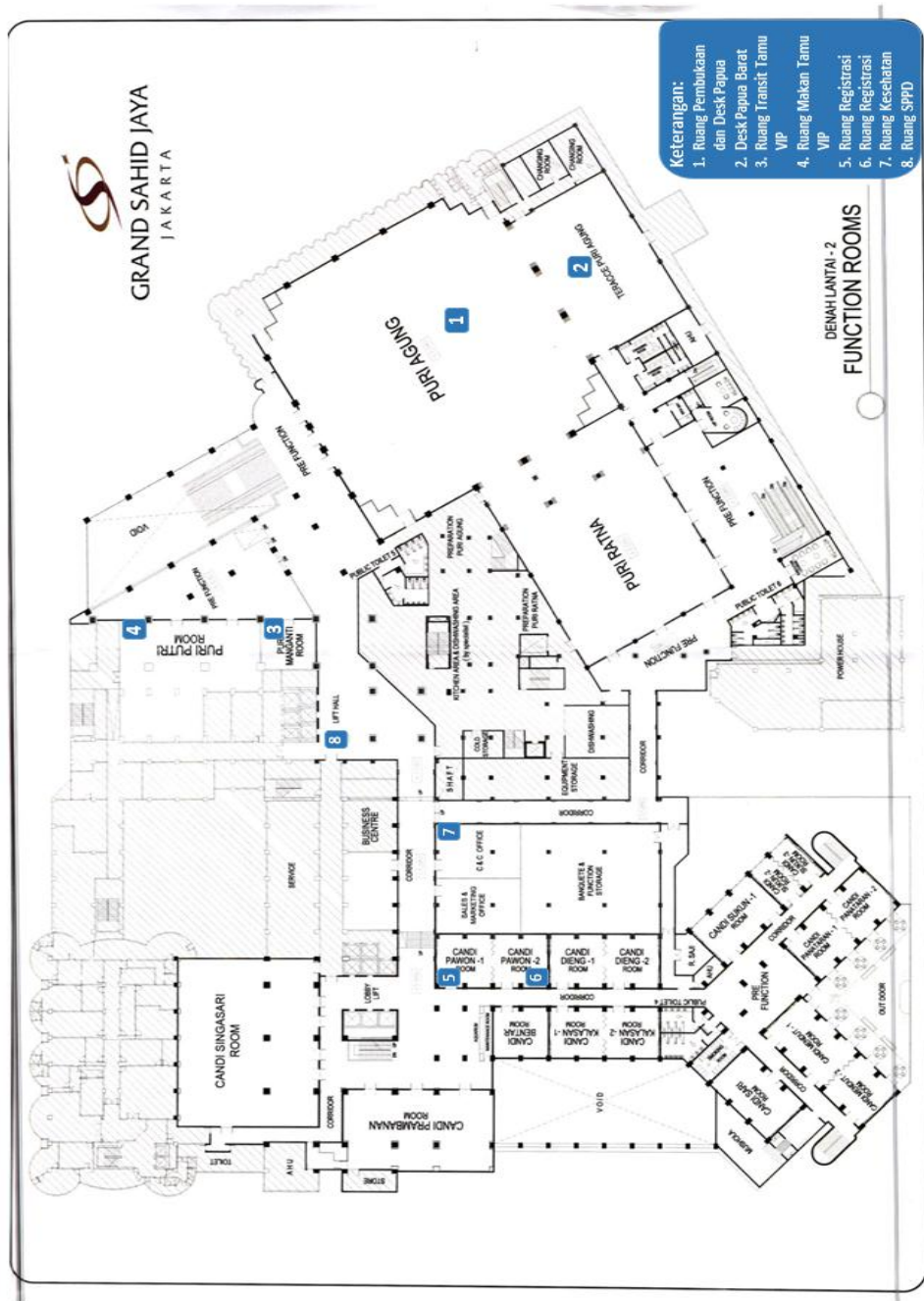
**Gambar 2**  
**Layout Ruang Pembahasan dan Teknis Pelaksanaan Musrenbangnas 2018**



## Denah Grand Sahid Jaya

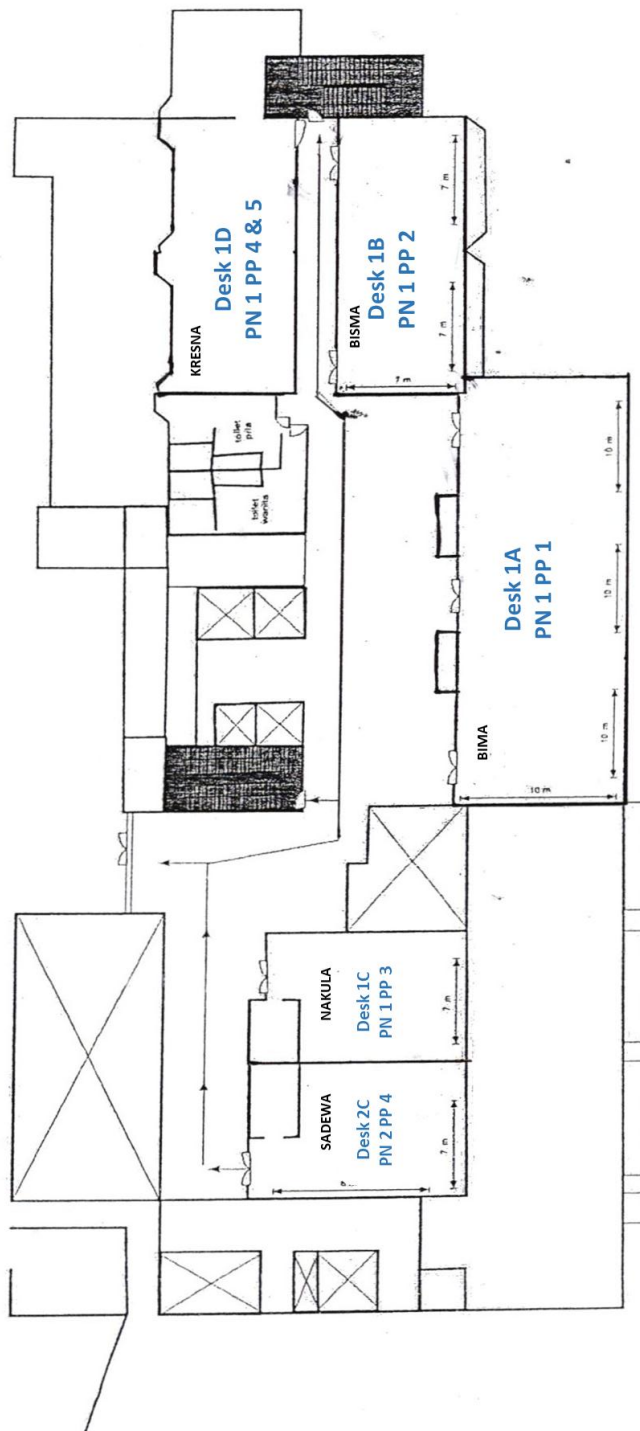
**Gambar 3**  
**Denah Acara Pembukaan Musrenbangnas 2018**

### Layout Hotel Grand Sahid Jaya

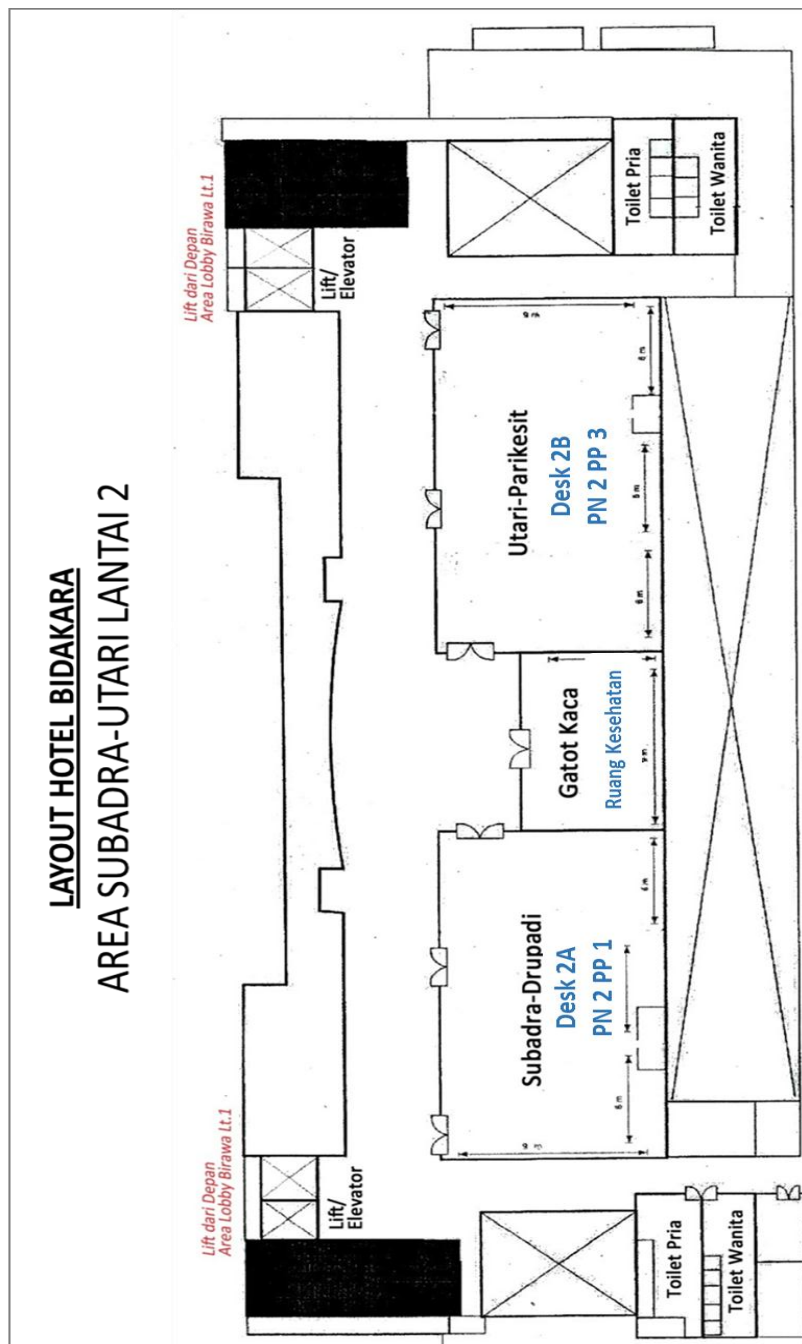


**Gambar 4**  
**Denah Ruang Pembahasan PN 1 dan PN 2 (PP 4)**

Layout Area Bima



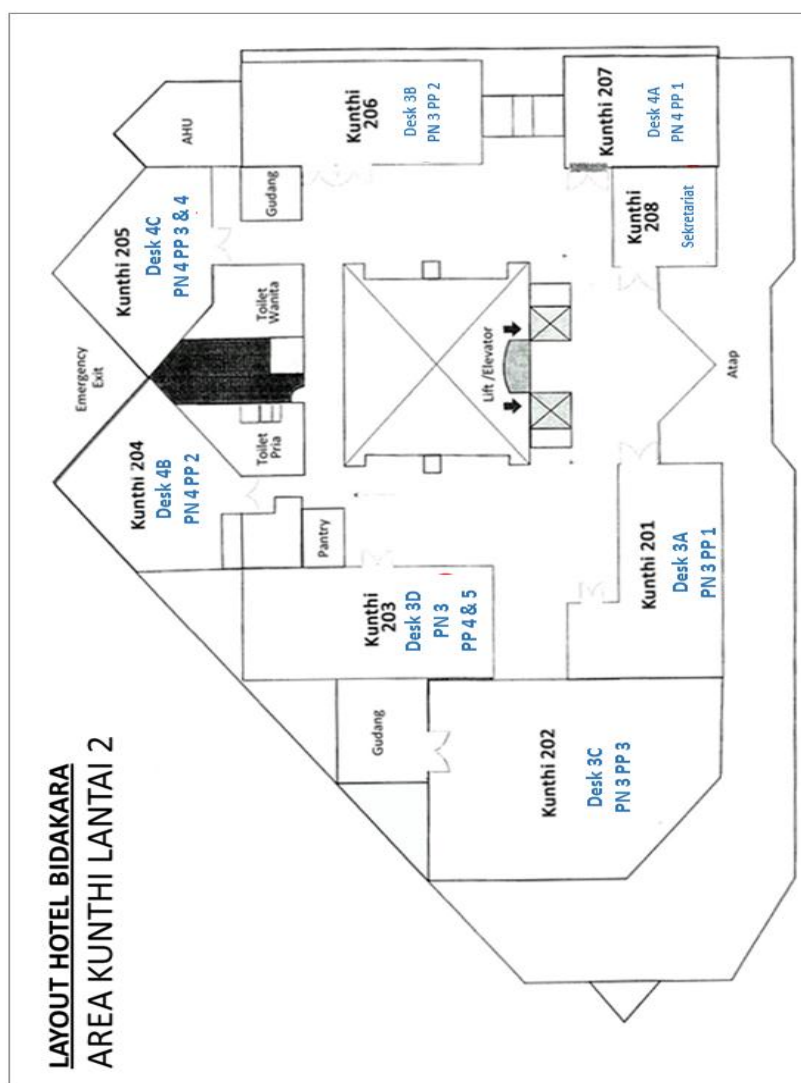
## Layout Area Subadra



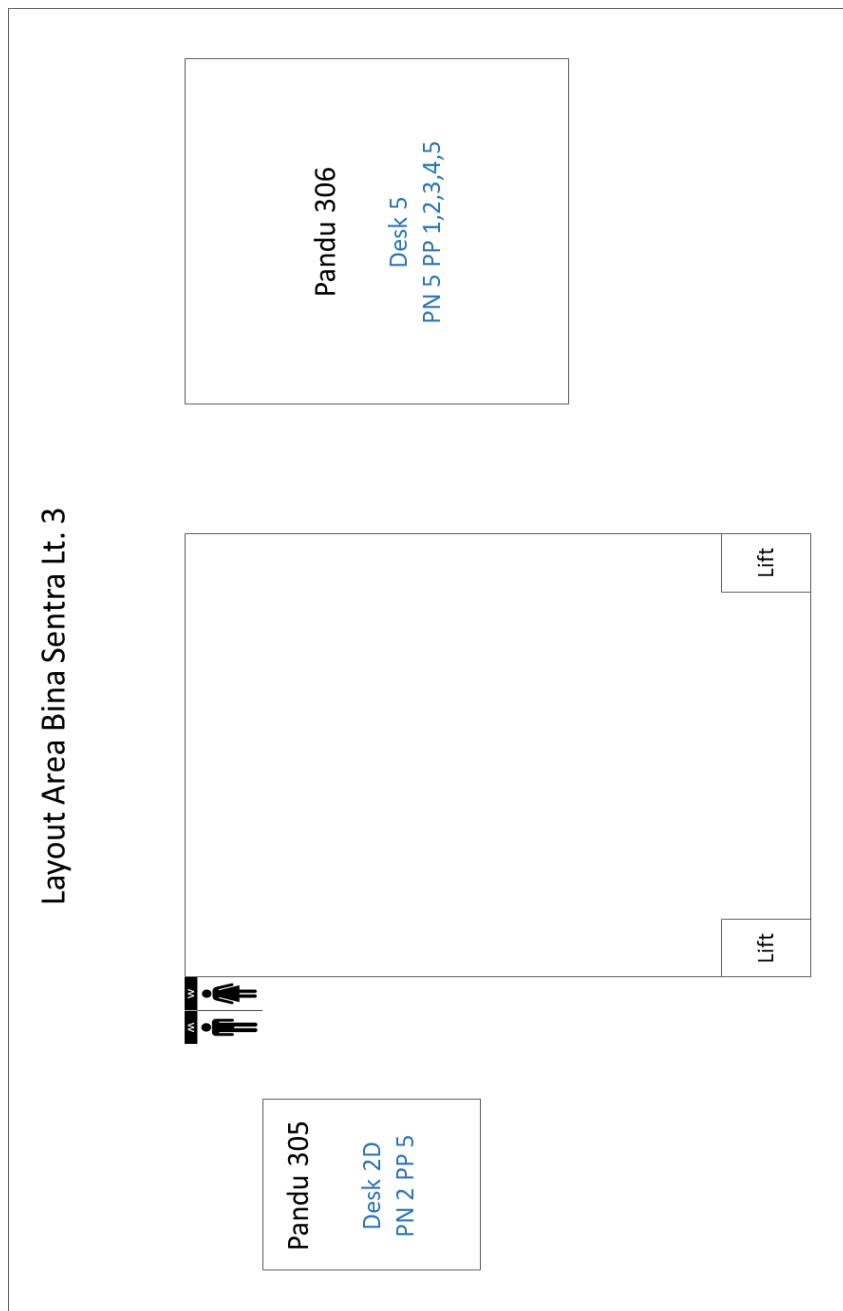
\*Catatan: Pembahasan PN 2 PP 5 dilakukan di ruang pandu 305, Area Bina Sentra, Lt.3



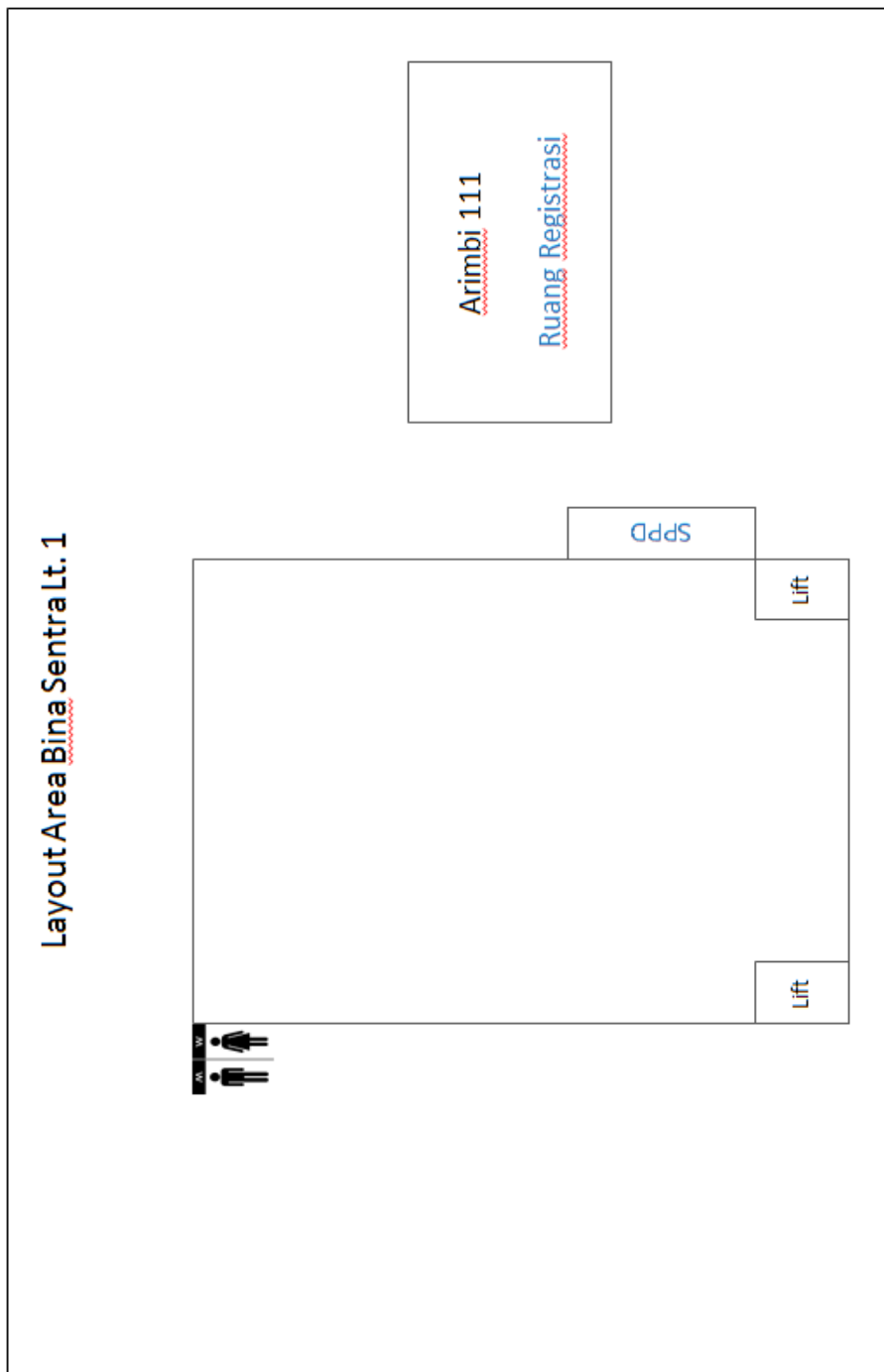
**Gambar 6**  
**Denah Ruang Pembahasan PN 3, PN 4 dan Ruang Sekretariat**



**Gambar 7**  
**Denah Ruang Pembahasan PN 5 dan PN 2 (PP 5)**



**Gambar 8**  
**Denah Ruang Pembahasan Ruang Registrasi dan SPPD**



Diterbitkan oleh:

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp : (021) 31934511

Email : [pkukm@bappenas.go.id](mailto:pkukm@bappenas.go.id)

Web : [musrenbangnas.bappenas.go.id](http://musrenbangnas.bappenas.go.id)

